

Anggota DPRD DKI Jakarta Ajak Warga Patuhi Protokol Kesehatan

JAKARTA (IM) – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, mengajak warga agar mematuhi protokol kesehatan. Seperti diketahui bahwa Pemprov DKI memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.

“Jangan abai dalam proses. Memang tidak enak memakai masker, tapi jauh lebih tidak enak lagi jika abai masuk RS karena abai memakai masker,” ujar Arifin dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).

Menurut Arifin, , perpanjangan PSBB mengikuti periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah. PPKM sendiri telah diperpanjang kedua kalinya hingga 8 Februari 2021.

“Kasus Covid-19 di DKI bertambah 3.512 kasus, sehingga total kasus

Covid-19 di Jakarta mencapai 249.815 kasus, sehingga sangat wajar jika Gubernur Anies memperpanjang kembali PSBB,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI itu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia sebelumnya menyampaikan, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 221.567 orang dengan tingkat kesembuhan 88,7 persen. Sebanyak 4.024 orang meninggal dengan tingkat kematian 1,6 persen, adapun rasio tes PCR per 1 juta penduduk sebanyak 238.320. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 129.233.

Sementara itu, dalam sepekan terakhir untuk positivity rate atau persentase hasil tes positif sebesar 16,5 persen, yang secara akumulatif sebesar 9,8 persen. “Angka itu jauh di atas standar WHO juga menetapkan standar persentase kasus Covid-19 tidak lebih dari 5 persen,” tandasnya. ● osm

Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor dan Sudimara Alami Peningkatan

BEKASI (IM) – Jumlah penumpang KRL di Stasiun Bekasi pada Senin (25/1) pagi, meningkat. Panjang antrean diperkirakan mencapai 100 meter. Namun demikian, antrean para calon penumpang itu tampak berjarak.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mayoritas dari penumpang terlihat mengenakan masker sesuai dengan protokol kesehatan.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengakui ada penambahan jumlah penumpang di Stasiun Kota Bekasi pada Senin pagi kemarin.

“Stasiun Bekasi sebanyak 6.799 pengguna, naik 1 persen, dari sebelumnya,” kata Anne dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1). Namun kenaikan jumlah penumpang di pekan ketiga Januari 2021, bukan hanya terjadi di stasiun Bekasi saja. Antrean panjang penumpang KRL juga terjadi

di Stasiun Bogor dan Stasiun Sudimara. “Stasiun Bogor sebanyak 12.797 pengguna, naik 29 persen dibanding waktu yang sama pekan lalu, Stasiun Bekasi dan Stasiun Sudimara sebanyak 5.230 pengguna, naik 4 persen,” kata Eva dalam penjelasannya.

Eva mengakui bahwa pihaknya masih menyesuaikan operasional dengan 964 perjalanan KRL per hari dimulai pukul 04.00-22.00. Ketentuan itu sesuai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Eva mengimbau para pengguna tetap berjaga jarak saat mengantre dan menggunakan masker. Protokol kesehatan harus tetap dilakukan agar memperkecil potensi penyebaran Covid-19.

“Kami juga imbau untuk tetap mematuhi arahan pemerintah dengan mengurangi mobilitas serta mengatur bekerja dari kantor sebesar 25 persen guna menekan penyebaran Covid-19,” kata Anne. ● osm

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



ANTREAN PENUMPANG DI STASIUN BEKASI

Sejumlah calon penumpang berbaris antre untuk masuk ke Stasiun Bekasi, Senin (25/1). Antrean penumpang KRL Commuter Line tersebut terjadi akibat kebijakan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Jumlah Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta Hanya Tersisa 14%

Gubernur Anies sebut Satgas Covid-19 di tingkat RW memegang peranan penting untuk menekan penyebaran virus di tingkat keluarga, serta menyiapkan langkah lanjutan jika ada yang terpapar.

JAKARTA (IM) - Lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta berdampak pada ketersediaan tempat tidur isolasi yang semakin menipis. Unit tempat tidur isolasi di DKI Jakarta disebut hanya tersisa 14 persen.

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, dari 8.055 unit tempat tidur yang tersedia di seluruh Jakarta, 6.954 di antaranya telah terisi.

“Ketersediaan tempat tidur isolasi per 24 Januari 2021 hanya menyisakan 14 persen,” ucapnya di Jakarta, Minggu 24 Januari 2021.

Namun Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941 unit. Nantinya total tempat tidur isolasi yang

disediakan di Jakarta sebanyak 9.996 unit.

Perkuat Satgas Covid-19 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengajak seluruh pihak untuk menjaga Jakarta dengan menggalang seluruh sumber daya guna menekan laju paparan virus korona (Covid-19).

Salah satu cara untuk menekan laju penyebaran Covid-19 adalah memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat paling kecil yakni Rukun Warga (RW). Sebab Satgas Covid-19 di tingkat RW memegang peranan penting, khususnya untuk menekan laju penyebaran virus di tingkat keluarga, serta menyiapkan langkah lanjutan jika ada yang terpapar.

“Satgas Covid-19 terutama

pada tingkat RW yang sudah ada akan lebih kami maksimalkan, terlebih mereka telah berpengalaman selama hampir setahun. Nantinya, mereka juga akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya kluster keluarga karena kluster keluarga menyumbang 566 kluster, setelah kluster perkantoran sebesar 312 kluster,” tutur Anies di Jakarta, Senin (25/1).

Anies kembali menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektoral dan integral dengan daerah sekitar Jakarta guna menanggulangi laju penyebaran Covid-19. Terlebih, jika melihat data per 24 Januari, sebanyak 24 persen pasien yang dirawat di faskes DKI merupakan warga BodeTABEK dan luar Jabodetabek.

“Di Jakarta ini ada suasana

di mana warga merasakan bahwa ada yang mengkhawatirkan terhadap penyebaran Covid-19, sehingga itu akan meningkatkan kewaspadaan kita. Kami berharap, suasana ini juga dirasakan warga di luar Jakarta, sehingga tanggung jawab untuk menanggulangi dan mencegah paparan Covid-19 dapat dilakukan bersama-sama,” tutur Anies. ● osm

Usai Mensos Risma Blusukan, Diam-diam Anies Tinjau Kolong Jembatan Pegangsaan

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam mengunjungi lokasi penataan kolong jembatan yang terletak di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/1) kemarin.

Dalam kunjungannya, Anies memasuki lorong sambil mengamati setiap sudut kolong jembatan yang saat ini sudah mulai tertata dengan tanaman hias dan kolam ikan.

“Bagus yaa,” ucap Anies.

Dalam kesempatan tersebut Anies juga meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera melanjutkan penataan agar menjadi lokasi yang bersih, aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsinya.

“Mudah-mudahan ini segera tuntas,” lanjut Anies.

Mensos RI Tri Rismaharini sebelumnya bertemu dengan para tunawisma di lokasi tersebut. Kunjungan Risma itu sempat viral di media sosial empat

virial di media sosial. Beragam komentar warganet terkait kunjungan Risma tersebut.

Di tempat yang sama, Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Irvandi mengatakan, penataan lokasi ini akan selesai dalam waktu dekat. Penataan ini terlaksana berkat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan suku dinas terkait yang ada di Jakarta Pusat dengan pihak eksternal. “Kita juga bekerja sama dengan IKJ dan PT Taspen untuk menyulap lokasi yang sebelumnya kumuh menjadi indah. Terima kasih untuk Taspen melalui program CSR-nya sudah membantu kami, juga untuk IKJ yang terlibat dalam pengecatannya,” ungkap Irvandi.

Sekadar informasi, kolong jembatan di wilayah pegangsaan ini sebelumnya dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal sementara oleh para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Namun saat ini, Pemprov DKI melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat terus melakukan penataan agar lokasi ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi warga sekitar. ● osm

DKI Siapkan 21 Rumah Sakit Bagi Warga Alami Efek Samping Vaksin

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan DKI telah menyiapkan 21 rumah sakit untuk merawat warga yang mengalami efek samping vaksin Covid-19 Sinovac.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, sejumlah dokter penyakit dalam dan dokter penyakit anak juga bakal disiapkan di 21 rumah sakit tersebut. “Upaya mitigasi itu akan dilakukan oleh Tim Komisariat Daerah Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (Komda KIPI). Kami juga sudah siapkan 21 rumah sakit untuk rujukan KIPI,” kata Widyastuti kepada wartawan, Senin (25/1).

Widyastuti menjelaskan, upaya mitigasi ini dilakukan karena setiap kegiatan vaksinasi memang harus disertakan upaya mitigasinya. Hal itu lantaran, beberapa jenis vaksin memang bisa menimbulkan keluhan yang sifatnya ringan hingga keluhan yang butuh perawatan. “Tapi tentunya fokus kita bukan berharap pada KIPI. Poinnya adalah mitigasinya bahwa kita mengantisipasi,” tambahnya.

Sekadar informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin sinovac memiliki efek samping. Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menargetkan 131 ribu tenaga kesehatan bakal melakukan vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang dimulai 15 Januari lalu. Untuk tahap kedua akan dilakukan Maret 2021 mendatang. ● osm



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PANITIA SELEKSI DIREKTUR PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN

Berdasarkan:

1. Dasar Pendirian Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Bogor.
3. Keputusan Bupati Bogor Nomor 539/24/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor.

Panitia Seleksi Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi Bakal Calon Direktur PT. BPRS Bogor Tegar Beriman, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

- A. Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Direktur PT. BPRS Bogor Tegar Beriman, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 2. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 4. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 5. membuat surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 6. Melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 7. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 8. Bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
 9. Tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 10. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan memegang jabatan struktural di perusahaan paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dengan penilaian baik dari pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang, serta melampirkan dokumen/akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 11. Bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Direksi pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut agar membuat Surat Pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Direksi pada BUMD tersebut selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
 12. Bagi pelamar yang masih aktif bekerja, melampirkan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan;
 13. Bagi pelamar yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi BUMD agar melampirkan hasil penilaian kinerja dari Dewan Pengawas/Komisaris dengan penilaian baik;
 14. Bagi pelamar yang berasal dari pegawai BUMD memiliki jabatan paling rendah satu tingkat di bawah Direksi serta melampirkan surat izin dari Direktur Utama dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai BUMD ketika terpilih menjadi Anggota Direksi;
 15. Pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;

16. Membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis BUMD;
17. Membuat Surat Pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
18. Membuat Surat Pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas lainnya atau Direksi pada BUMD sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar;
19. Membuat Surat Pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha BUMD;
20. Membuat surat pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
21. Membuat surat pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
22. Membuat pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia bekerja penuh waktu;
23. membuat surat pernyataan bermeterai minimal Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Direksi, atau diberhentikan sebagai Anggota Direksi apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar;
24. dinyatakan lulus dalam UKK oleh Lembaga Profesional.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Persyaratan administrasi sebagaimana dimuat dalam angka 1 diatas dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan dimasukkan kedalam 1 (satu) amplop tertutup serta ditujukan kepada **KETUA PANITIA SELEKSI DIREKTUR PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN;**
- b. Panitia Seleksi hanya menerima pendaftaran melalui **PO. BOX 126 CIBINONG 16900** dan tidak menerima berkas lamaran secara langsung;
- c. Pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal **26 JANUARI 2021** sampai dengan **3 FEBRUARI 2021** (Cap Pos);
- d. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman/situs resmi pemerintah Kabupaten Bogor (www.bogorkab.go.id) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan pendaftaran;
- e. Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam Uji Kelayakan dan Keputusan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional;
- f. Dalam Uji Kelayakan dan Keputusan, pelamar harus mempresentasikan makalah mengenai Visi, Misi, dan Strategi Kepemimpinan Perusahaan Daerah.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Panitia Seleksi tidak menerima kelengkapan susulan, perbaikan dan/atau penggantian berkas lamaran yang sudah masuk sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal **3 FEBRUARI 2021 PUKUL 24.00 WIB (Cap Pos);**
- b. Bagi surat lamaran yang cap posnya melewati batas akhir masa pendaftaran sebagaimana huruf a, Panitia Seleksi tidak akan menerima surat lamaran tersebut;
- c. Kelalaian tidak mengikuti informasi hasil seleksi administrasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Cibinong, 26 Januari 2021

Panitia Seleksi Direktur PT. BPRS Bogor Tegar Beriman

ttd

KETUA